PANDUAN PROGRAM

PANCASILA ACADEMIC IMMERSION

UPI BERDAMPAK

(PEDOMAN KO-KURIKULER MATA KULIAH PANCASILA)

- Pendidikan Anti Korupsi
- Anti Kekerasan Seksual dan *Bullying*
- Toleransi, Saling Menghormati, Anti Diskriminasi
- Anti-Radikalisme
- Nasionalisme & Cinta Tanah Air
- Pendidikan Berbasis SDGs





UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TAHUN 2026

PANDUAN PROGRAM
PANCASILA ACADEMIC IMMERSION
UPI BERDAMPAK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN PROGRAM PANCASILA *ACADEMIC IMMERSION*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BERDAMPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki komitmen untuk membentuk lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter Pancasila, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
b. bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila perlu dilaksanakan melalui pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman langsung melalui keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat;
c. bahwa Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak merupakan program akademik ko-kurikuler yang mendukung penguatan karakter, *civic engagement, experiential learning*, serta implementasi kebijakan Kampus Berdampak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Program Pancasila *Academic Immersion* Universitas Pendidikan Indonesia Berdampak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PROGRAM PANCASILA *ACADEMIC IMMERSION* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BERDAMPAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak adalah program akademik ko-kurikuler yang diselenggarakan UPI untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar kontekstual berbasis masyarakat, budaya, dan lingkungan sosial.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
4. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan oleh UPI untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program.
5. Mitra adalah lembaga pemerintah, dunia usaha dan industri, satuan pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas, atau lembaga lain yang bekerja sama dengan UPI dalam pelaksanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak.
6. Imersi Akademik adalah proses pembelajaran berbasis pengalaman langsung melalui keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran transformatif.
7. Panduan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak adalah dokumen resmi yang memuat ketentuan, mekanisme, prosedur, serta pedoman pelaksanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pasal 2

(1) Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak diselenggarakan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, dan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan UPI.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata;
    b. meningkatkan kepedulian sosial, tanggung jawab kebangsaan, dan semangat gotong royong mahasiswa;
    c. mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, kolaboratif, dan solutif;
    d. memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat; dan
    e. menghasilkan dampak sosial, akademik, dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang mengontrak mata kuliah Pendidikan Pancasila.
(2) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai ketentuan UPI.
(3) Mahasiswa peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. mengikuti seluruh tahapan kegiatan program;
    b. menjaga nama baik UPI;
    c. mematuhi ketentuan lokasi dan mitra kegiatan;
    d. menyusun laporan dan luaran kegiatan; dan
    e. melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab, etis, dan profesional.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak dilakukan secara berkelompok berdasarkan kelas yang sama dan dapat melibatkan mahasiswa lintas program studi dan/atau lintas fakultas.
(2) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan akademik di luar kampus yang terintegrasi dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pasal 5

Dosen Pembimbing bertugas:
a. memberikan pembimbingan akademik dan teknis;
b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c. melakukan penilaian terhadap capaian mahasiswa; dan
d. menyusun laporan pembimbingan program.

Pasal 6

Mitra berperan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan kerja sama dengan UPI.

Pasal 7

(1) Panduan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 disusun dalam bentuk buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) Panduan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pendahuluan;
    b. landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
    c. kajian teoritis dan konseptual;
    d. tujuan, manfaat, output, outcome, dan impact program;
    e. mekanisme dan tahapan pelaksanaan program;
    f. persyaratan dan tugas mahasiswa serta dosen pembimbing;
    g. bentuk kegiatan dan proyek aksi sosial;
    h. monitoring, evaluasi, dan penilaian;
    i. sistem pelaporan dan diseminasi hasil;
    j. tindak lanjut program; dan
    k. ketentuan administratif dan operasional lainnya.
(3) Panduan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, dosen, mahasiswa, dan mitra dalam penyelenggaraan program.

Pasal 8

Pendanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak dapat bersumber dari:
a. anggaran UPI;
b. kerja sama dengan mitra;
c. bantuan pemerintah; dan/atau
d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Mei 2026
a.n. REKTOR,
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,

VANESSA GAFFAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Tim Penyusun

Pengarah	Rektor
Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Ketua Pelaksana	Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta
Sekretaris	Kepala Divisi MKUK
Anggota :	Prof. Dr. Encep Syarief Nuridn, SH., Drs., M.Pd., M.Si.; Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si., SH.; Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.; Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.; Dr. Supriyono, M.Pd.; Dr. Rika Sartika, M.Pd..; Pitria Sopianingsih, M.Pd.; Vini Agustiani Hadian, M.Pd.; Dadi Mulyadi Nugraha, M.Pd.; Dr. Mulyana Abdullah, M.Pd.; Neli Masitoh, S.Tr.Akun.; Lise Hidayati, S.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Panduan Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak* dapat disusun dan dihadirkan sebagai bagian dari komitmen Universitas Pendidikan Indonesia dalam memperkuat peran strategis perguruan tinggi bagi pembangunan karakter bangsa.

Sebagai *leading and outstanding university* di bidang pendidikan, UPI memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, berintegritas, dan berkepribadian Pancasila. Program *Pancasila Academic Immersion* dirancang sebagai inovasi pembelajaran transformatif yang mendorong mahasiswa untuk mengalami, menghayati, dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual melalui keterlibatan langsung di masyarakat, lembaga publik, satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, serta ruang-ruang sosial dan budaya.

Atas nama pimpinan Universitas, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penulis, tim perumus, dosen, mitra lembaga, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan panduan ini melalui dedikasi, pemikiran, dan kerja kolaboratif yang berkelanjutan. Kehadiran buku panduan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu lulusan Universitas Pendidikan Indonesia.

Semoga Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak mampu menjadi wahana strategis dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila, berdaya saing global, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Bandung, 02 Mei 2026

Rektor,

PRAKATA TIM PENYUSUN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Program *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya strategis Universitas Pendidikan Indonesia dalam memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan karakter bangsa.

Program *Pancasila Academic Immersion* merupakan inovasi akademik UPI yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman pembelajaran transformatif melalui keterlibatan langsung mahasiswa di masyarakat, lembaga publik, satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, serta komunitas sosial dan budaya. Melalui pendekatan imersi akademik, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mengembangkan kepekaan sosial, kepemimpinan moral, serta perilaku yang berdampak bagi masyarakat.

Program ini selaras dengan kebijakan nasional Kampus Berdampak, strategi pembangunan sumber daya manusia unggul, serta visi UPI sebagai universitas pelopor dan unggul dalam pendidikan berkarakter. Tidak hanya sebagai aktivitas akademik, program ini menjadi ruang pembentukan integritas, empati sosial, kreativitas, dan kemampuan reflektif mahasiswa dalam merespons tantangan kebangsaan di era transformasi digital.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, mitra lembaga, dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan terarah, terstandar, dan berkualitas. Kami berharap panduan ini menjadi pedoman yang aplikatif dan akuntabel dalam mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat dan institusi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga program ini menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan UPI dalam membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berdampak.

Bandung, 02 Mei 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Naskah Peraturan Rektor
Tim Penyusun 1

KATA PENGANTAR 2
PRAKATA TIM PENYUSUN 3
DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6
B. Maksud dan Tujuan 7
C. Manfaat Program 7
D. Output, Outcome, dan Impact 8
E. Landasan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Landasan Konseptual Pancasila 12
B. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila 16
C. *Experiential Learning* *21*
D. *Civic Engagement* dan Pemberdayaan 26
E. Imersi Akademik 30

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM 36

A. Status Program 36
B. Sasaran Program 36
C. Lokasi Kegitan 38
D. Durasi Pelaksanaan Program 39
E. Tahapan Pelaksanaan 40
F. Ragam Bentuk Kegiatan 42

BAB IV LAPORAN KEGIATAN DAN KRITERIA PENILAIAN 44

A. Bentuk Laporan 44
B. Kriteria Penilaian 45

C. Instrumen Evaluasi 46
D. Bobot dan Skala Penilaian 48
E. Syarat Kelulusan 48
F. Diseminasi Hasil Kegiatan 48
G. Tindak Lanjut 49

BAB V PENUTUP 50

DAFTAR PUSTAKA 51

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak adalah nama program yang menggambarkan sebuah kegiatan akademik yang bersifat ko-kurikeler bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pembelajaran kontekstual, pengalaman lapangan, interaksi sosial, dan pemecahan masalah nyata dalam masyarakat.

Perkembangan zaman pada era globalisasi dan percepatan transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Generasi muda, termasuk mahasiswa, berada pada persimpangan antara gelombang informasi global yang masif dengan kebutuhan menjaga identitas, karakter, dan jati diri bangsa. Arus globalisasi yang tidak terbendung menghadirkan tantangan seperti degradasi moral, krisis karakter, pergeseran budaya, individualisme, hingga meningkatnya intoleransi sosial.

Di tengah dinamika tersebut, urgensi penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting sebagai fondasi moral, ideologis, dan kebangsaan. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga pedoman hidup dalam berperilaku, bersosial, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh karena itu, internalisasi nilai Pancasila harus dilakukan secara berkelanjutan dan kontekstual, terutama pada generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa.

Sebagai universitas pelopor dalam pendidikan dan pencetak tenaga pendidik unggul, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, karakter Pancasila, serta kemampuan memahami realitas sosial secara mendalam. Pendidikan karakter yang bersifat teoritis saja tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan era modern. Untuk itu, diperlukan model pembelajaran inovatif yang memungkinkan mahasiswa *mengalami secara langsung* praktik nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat, bukan sekadar mempelajarinya secara konseptual di kelas.

Program *Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak* diharapkan menjadi solusi transformatif dalam penguatan karakter mahasiswa melalui pengalaman sosial yang otentik. Melalui program ini, mahasiswa dapat belajar memahami dinamika masyarakat, mengidentifikasi masalah nyata, serta menerapkan nilai Pancasila dalam merancang ide dan aksi positif bagi kehidupan sosial. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya mencerdaskan intelektual, tetapi juga membangun karakter dan kepekaan sosial yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

B. Maksud dan Tujuan

Program *Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak* dimaksudkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran langsung kepada mahasiswa melalui kegiatan akademik di luar kampus yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk:

1. Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman nyata, observasi sosial, dan interaksi dengan masyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan solutif terhadap persoalan sosial dan budaya.
3. Menumbuhkan kesadaran kebangsaan, jiwa gotong royong, dan kepedulian sosial.
4. Membekali mahasiswa kemampuan merancang dan mengimplementasikan solusi kreatif berbasis nilai Pancasila untuk menjawab tantangan sosial.
5. Memperkuat kemitraan universitas dengan masyarakat melalui program akademik, penelitian, dan pengabdian yang berkelanjutan.

C. Manfaat Program

1. Manfaat untuk Mahasiswa
    a. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran berbasis pengalaman.
    b. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan empati, kepekaan sosial, dan karakter kebangsaan.
    c. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.
    d. Mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman sosial di lingkungan masyarakat yang beragam.
    e. Mahasiswa diharapkan dapat membentuk profil lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.
2. Manfaat untuk Institusi
    a. Meningkatkan reputasi UPI sebagai pelopor pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.
    b. Mengembangkan inovasi kurikulum dan model pembelajaran kontekstual sejalan dengan konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
    c. Memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan organisasi sosial.
    d. Menumbuhkan budaya akademik berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada nilai Pancasila.

3. Manfaat untuk Masyarakat
   a. Mendapatkan kontribusi pengetahuan, gagasan, dan aksi sosial dari mahasiswa.
   b. Menjadi mitra dalam penyelesaian persoalan sosial dan pembangunan berbasis kolaborasi dan gotong royong.
   c. Memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
   d. Mewujudkan lingkungan sosial yang lebih harmonis, toleran, dan partisipatif.

D. Output, Outcome, dan Impact

Tahapan	Definisi	Bentuk pada Pancasila Academic Immersion
Output	Hasil langsung setelah kegiatan selesai.	- Laporan akademik kegiatan - Dokumentasi kegiatan lapangan - Produk program aksi sosial/solusi untuk masyarakat - Presentasi dan refleksi nilai Pancasila
Outcame	Hasil jangka menengah berupa peningkatan kompetensi dan karakter peserta.	- Tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan kepedulian sosial - Peningkatan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif - Terjalinnya kemitraan berkelanjutan antara UPI dan masyarakat
Impact	Dampak jangka panjang yang dirasakan oleh mahasiswa, kampus, dan masyarakat.	- Terbentuknya lulusan berkarakter Pancasila - Penguatan budaya akademik berbasis nilai Pancasila di UPI - Kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa

E. Landasan

1. Landasan Filosofis

   Landasan filosofis program *Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak* berpijak pada pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya proses mentransfer pengetahuan, tetapi juga sarana membentuk manusia yang berkarakter, bermoral, dan berkepribadian sesuai nilai luhur bangsa. Filosofi ini selaras dengan hakikat pendidikan nasional yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang harus

mengembangkan potensi intelektual, spiritual, sosial, dan emosional secara utuh.
Konsep Pancasila**,** Academic**,** dan Immersion menjadi fondasi filosofis dalam penyelenggaraan program ini.

Pancasila
Menegaskan bahwa program ini berorientasi pada:
1. Penguatan nilai kebangsaan
2. Pembentukan karakter
3. *Civic virtue* (keutamaan warga negara)
4. Integritas dan moral publik
5. Pembiasaan nilai dalam kehidupan nyata

Pancasila diposisikan sebagai pedoman etika dan moral yang harus dihayati sekaligus dipraktikkan dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat.

Academic
Menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki sifat:
1. Ilmiah
2. Terstruktur
3. Berbasis kurikulum
4. Didukung metode pembelajaran yang sistematis
5. Menghasilkan luaran akademik berupa laporan, publikasi, proyek, atau inovasi sosial

Dengan demikian, aktivitas lapangan bukan sekadar pengalaman sosial biasa, tetapi pengalaman akademik yang diarahkan pada *knowledge production*, refleksi ilmiah, dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Immersion Imersi
Maknanya:
1. Mahasiswa *terjun langsung* ke masyarakat
2. Belajar melalui pengalaman nyata (*experiential learning*)
3. Mengalami, merasakan, dan memahami konteks sosial secara mendalam
4. Melibatkan interaksi langsung dengan budaya, komunitas, institusi publik, atau problem sosial

Program ini bukan sekadar kunjungan, observasi, atau pengabdian insidental, melainkan pengalaman belajar mendalam (*deep learning experience*) yang menempatkan mahasiswa untuk "hidup" dalam nilai-nilai Pancasila selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian,

internalisasi nilai tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi berlanjut pada ranah afektif dan konatif (kebiasaan bertindak).

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis program *Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak* berpijak pada regulasi nasional maupun institusional yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, pembelajaran kontekstual, dan penguatan nilai Pancasila, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**,** khususnya Pembukaan alinea ke-4 tentang tujuan pendidikan bangsa.
2. Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Nasional, dan Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)**.**
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong pembelajaran di luar kampus melalui kegiatan akademik berbasis pengalaman lapangan.
6. Statuta Universitas Pendidikan Indonesia yang menegaskan peran UPI sebagai pelopor dan pelaksana pendidikan untuk membangun manusia berkarakter luhur dan berjati diri bangsa.

Berdasarkan landasan tersebut, pelaksanaan *Pancasila Academic Immersion* memiliki kekuatan hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kompetensi sosial mahasiswa.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis program ini berangkat dari realitas sosial bahwa masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Perubahan sosial dan budaya akibat globalisasi
2. Pola interaksi sosial yang mulai mengarah pada individualisme
3. Meningkatnya fenomena intoleransi, disinformasi, dan polarisasi media sosial
4. Ketimpangan sosial ekonomi di berbagai wilayah

5. Degradasi nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa kebangsaan

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki potensi sosial, budaya, ekonomi, dan kearifan lokal yang dapat menjadi ruang pembelajaran karakter jika mahasiswa terlibat secara langsung dalam aktivitas sosial.

Oleh karena itu, pelaksanaan *Pancasila Academic Immersion* bertujuan untuk:

1. Menjembatani dunia akademik dengan kehidupan sosial masyarakat
2. Meningkatkan sensitivitas dan kepedulian sosial mahasiswa
3. Menumbuhkan wawasan kebangsaan melalui interaksi nyata dengan keanekaragaman budaya dan sosial
4. Mengembangkan kolaborasi masyarakat–kampus sebagai bagian dari pembangunan bangsa

Dengan landasan sosiologis tersebut, program ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara serta memahami dinamika kehidupan masyarakat melalui pengalaman personal dan hubungan sosial yang autentik.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual Pancasila

1. Hakikat dan Fungsi Pancasila

Pancasila secara filosofis dapat dipahami sebagai suatu sistem nilai yang bersifat mendasar, mutlak, dan abstrak yang menjadi esensi dari kepribadian bangsa Indonesia. Menurut teori yang dikemukakan oleh Notonagoro, hakikat Pancasila ialah hakikat yang bersifat abstrak, umum, dan universal karena nilai-nilainya tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Hakikat sila-sila Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan sistematis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Amri, 2018). Pemahaman mengenai hakikat menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai slogan politik, melainkan sebagai ontologi atau keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri.

Fungsi Pancasila yang paling utama adalah sebagai pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun interaksi sosial antarwarga negara agar tercipta keharmonisan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila (Sianturi & Dewi, 2021). Hal ini berarti bahwa setiap tindakan moral, keputusan politik, dan perilaku hukum warga negara harus merupakan pancaran dari nilai-nilai luhur Pancasila. Tanpa adanya fungsi ini, bangsa Indonesia akan kehilangan arah dan tujuan dalam menghadapi tantangan zaman.

Selain sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (*Volkgeist*) yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi ini menegaskan bahwa Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa dan nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat nusantara sebelum negara Indonesia terbentuk. Kepribadian bangsa Indonesia adalah karakteristik unik yang tercermin dalam sikap mental dan tingkah laku yang berlandaskan pada nilai Pancasila (Darmodiharjo, 1991). Identitas nasional ini menjadi benteng pertahanan budaya di tengah arus globalisasi yang membawa ideologi asing. Oleh karenanya, Pancasila berfungsi menjaga orisinalitas karakter bangsa agar tidak larut dalam budaya asing yang tidak sesuai.

Fungsi integratif Pancasila juga sangat vital, yaitu sebagai pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan antargolongan. Pancasila berperan sebagai *common denominator* atau titik temu yang dapat diterima oleh semua elemen bangsa tanpa memandang latar belakang primordial. Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disepakati oleh para pendiri negara untuk mengikat persatuan seluruh rakyat (Latif, 2011). Keberadaan Pancasila menjamin bahwa keberagaman tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan yang dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi ini menjadikan Pancasila sebagai alat perekat sosial yang paling efektif dalam sejarah politik Indonesia.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan landasan yuridis dan filosofis bagi penyelenggaraan negara Indonesia secara formal. Kedudukan ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang meletakkan sila-sila Pancasila sebagai dasar fundamental bagi pembentukan hukum dan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Asshiddiqie, 2021). Hal ini menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum. Konsekuensinya, setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Dalam kajian hukum tata negara, Pancasila diposisikan sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Konsep ini diadopsi dari teori Hans Nawiasky yang menempatkan Pancasila di atas konstitusi (UUD 1945) sebagai landasan statis berdirinya negara. Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* menjadikannya sebagai syarat mutlak bagi berdirinya tatanan hukum di Indonesia yang memberikan legitimasi bagi konstitusi itu sendiri (Erwinsyahbana & Syahbana, 2018). Jika dasar negara ini diubah atau ditiadakan, maka secara teoritis bangunan negara yang didirikan di atasnya akan runtuh atau bubar. Oleh sebab itu, menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara.

Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa guna mencapai tujuan nasional. Hal ini mencakup etika politik dan administrasi negara di mana para pejabat publik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dalam menjalankan kekuasaannya. Penyelenggaraan negara yang tidak didasarkan

pada moralitas Pancasila akan melahirkan penyimpangan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan sosial (Mahfud, 2010). Dasar negara ini menuntut adanya akuntabilitas moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pertanggungjawaban kepada rakyat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Maka tentunya, Pancasila bukan hanya simbol seremonial, tetapi merupakan parameter etis bagi birokrasi pemerintahan.

Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara bersifat terbuka (*open ideology*), yang artinya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Sifat terbuka ini memungkinkan Pancasila untuk menanggapi dinamika aspirasi masyarakat dan tantangan global secara proaktif dan antisipatif. Ideologi terbuka memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memungkinkan Pancasila tetap relevan dalam setiap periode sejarah ketatanegaraan Indonesia (Topayung & AP, 2025). Keterbukaan ini tidak berarti mengubah nilai dasar, melainkan mengembangkan nilai instrumental dan praksis agar dapat diterapkan secara operasional dalam kehidupan bernegara. Hal ini membedakan Pancasila dengan ideologi tertutup yang cenderung dogmatis dan otoriter.

3. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang saling berkaitan. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi sumber bagi nilai-nilai turunannya (Suaila & Krisnan, 2019). Sementara itu, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar ke dalam bentuk norma hukum seperti UUD, Undang-Undang, dan peraturan daerah. Lalu adapun nilai praksis yang merupakan realisasi nilai instrumental dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sila pertama dan kedua, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung nilai moral religius dan humanis yang mendalam. Sila pertama menjiwai sila-sila lainnya, yang berarti segala aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada moralitas ketuhanan dan toleransi antarumat beragama. Nilai ketuhanan dalam Pancasila bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi basis moral dalam membangun hubungan kemanusiaan yang beradab (Latif, 2011). Sila kedua menekankan pada pengakuan harkat dan martabat manusia serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Sinergi kedua nilai ini menciptakan fondasi spiritual dan etika sosial yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Sila ketiga dan keempat, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai solidaritas dan demokrasi. Nilai persatuan menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan demi keutuhan wilayah. Nilai kerakyatan dalam Pancasila mengajarkan prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang hanya berbasis pada suara mayoritas semata (Swasono & Hatta, 2002). Nilai ini menolak segala bentuk tirani minoritas maupun dominasi mayoritas dalam proses pengambilan keputusan politik. Kedua sila ini menjadi landasan bagi integrasi nasional dan sistem politik yang demokratis.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir dari implementasi nilai-nilai Pancasila yang lain. Nilai ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional harus bermuara pada kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir elit (Jamiah et al., 2025). Sila ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan nilai Pancasila ini bersifat hierarkis piramidal, di mana sila pertama menjiwai sila di bawahnya dan sila kelima diliputi oleh keempat sila di atasnya.

4. Aktualisasi Nilai Pancasila

Aktualisasi nilai Pancasila adalah proses perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif yang saling melengkapi. Aktualisasi objektif adalah penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk kelembagaan negara, hukum, dan perundang-undangan di Indonesia (Robuwan & Zulkifli, 2024). Artinya, seluruh produk hukum dan kebijakan negara harus merupakan terjemahan konkret dari sila-sila Pancasila. Tanpa aktualisasi objektif yang konsisten, Pancasila hanya akan menjadi dokumen statis yang tidak memiliki daya paksa dan daya atur.

Aktualisasi subjektif berkaitan dengan pelaksanaan nilai Pancasila dalam perilaku individu setiap warga negara dan penyelenggara negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyangkut kesadaran moral dan ketaatan hukum yang muncul dari hati nurani masing-masing individu untuk mengamalkan Pancasila. Aktualisasi subjektif dinilai lebih penting karena keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif sangat bergantung pada integritas moral para pelaksananya (Notonagoro, 1975). Warga negara diharapkan mampu menginternalisasi nilai kejujuran, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab

sosial dalam interaksi sosial. Pendidikan karakter berbasis Pancasila memegang peranan kunci dalam membentuk aktualisasi subjektif ini sejak dini.

Tantangan dalam aktualisasi Pancasila di era modern semakin kompleks akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Masuknya ideologi transnasional dan budaya asing yang tidak sesuai seringkali menggerus nilai-nilai lokal dan semangat nasionalisme generasi muda. Degradasi moral dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan merupakan indikator belum optimalnya aktualisasi nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika global (Setijo, 2009). Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi nilai Pancasila dengan metode yang adaptif dan relevan dengan konteks kekinian agar mudah diterima oleh masyarakat. Aktualisasi tidak boleh kaku, namun harus dinamis tanpa kehilangan substansi dasarnya.

Upaya memperkuat aktualisasi nilai Pancasila memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat sipil secara berkelanjutan. Pemerintah harus memberikan keteladanan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, sementara pendidikan harus mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan salah satu instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan aktualisasi nilai dasar negara kepada generasi penerus (Winarno, 2006). Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tegas juga merupakan bentuk nyata dari aktualisasi nilai keadilan sosial. Dengan kerjasama semua pihak, nilai Pancasila dapat benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

B. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila

1. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mendidik warga negara agar memiliki watak psikologis, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras. Pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*moral knowing*), mencintai kebaikan (*moral feeling*), dan melakukan kebaikan (*moral acting*) (Lickona, 1992). Tanpa ketiga aspek ini yang berjalan beriringan, pendidikan karakter tidak akan efektif karena hanya akan berhenti pada tataran kognitif saja tanpa menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, konsep ini menekankan pada pembentukan kebiasaan (habit) sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan apa yang baik.

Di Indonesia sendiri, pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan dasar negara. Pendidikan karakter di Indonesia dirumuskan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter berbasis Pancasila bertujuan membentuk manusia Indonesia yang bermoral, beretika, dan berbudi pekerti luhur dengan menjiwai nilai-nilai falsafah negara (Zubaedi, 2015). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Konsep ini menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai materi hafalan, melainkan sebagai *core value* pembentukan kepribadian.

Pendidikan karakter juga berfungsi sebagai filter atau penyaring terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa di era globalisasi. Derasnya arus informasi seringkali membawa dampak negatif berupa degradasi moral, individualisme, dan hedonisme yang mengancam jati diri generasi muda. Pendidikan karakter memiliki fungsi perbaikan, penyaring, dan pembangun fondasi moral agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitasnya di tengah pergaulan antarbangsa (Samani, 2019). Melalui penguatan karakter, individu diharapkan memiliki ketahanan mental dan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Maka dari itu, konsep pendidikan karakter memiliki dimensi perlindungan kultural selain dimensi pedagogis.

Keberhasilan konsep pendidikan karakter sangat bergantung pada keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Sekolah atau perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan lingkungan keluarga sebagai madrasah pertama dan masyarakat sebagai laboratorium sosial. Pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan integrasi kurikulum, budaya sekolah, dan kemitraan dengan orang tua serta masyarakat (Koesoema, 2019). Konsep ini menolak pandangan bahwa pendidikan moral adalah tanggung jawab guru agama atau guru kewarganegaraan semata. Tanggung jawab pembentukan karakter adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai kebaikan.

2. Pembiasaan Nilai

Pembiasaan nilai merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam pendidikan karakter untuk mengubah pengetahuan moral menjadi tindakan

moral yang otomatis. Metode ini didasarkan pada teori psikologi behavioristik yang menekankan pada pengkondisian lingkungan untuk membentuk perilaku yang diinginkan secara berulang-ulang. Pembiasaan adalah proses penciptaan situasi yang memungkinkan peserta didik untuk membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku sehingga perilaku tersebut menjadi karakter yang melekat (Mulyasa, 2022). Dalam proses ini, pada awalnya seseorang mungkin melakukan kebaikan karena aturan atau tuntutan lingkungan, namun lama-kelamaan perilaku tersebut akan terinternalisasi menjadi kebutuhan pribadi. Tanpa adanya pembiasaan, nilai-nilai luhur hanya akan berhenti sebagai wacana tanpa implementasi nyata.

Proses pembiasaan nilai memerlukan konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial. Sekolah dan perguruan tinggi harus menciptakan budaya akademik (*academic culture*) yang mendukung praktik nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, disiplin, dan toleransi dalam aktivitas sehari-hari. Lingkungan pendidikan yang kondusif berfungsi sebagai *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi yang secara tidak langsung membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik melalui rutinitas harian (Wibowo, 2012). Contoh konkret pembiasaan ini meliputi budaya antre, budaya bersih, larangan menyontek, hingga budaya diskusi yang demokratis. Jika lingkungan tidak mendukung, maka nilai yang diajarkan di dalam kelas akan mentah kembali ketika peserta didik berada di luar kelas.

Selain lingkungan fisik dan sosial, peran keteladanan (*uswah hasanah*) dari pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan metode pembiasaan. Pendidik bukan hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi harus juga menjadi model perilaku yang baik bagi peserta didiknya. Keteladanan adalah metode pendidikan yang paling meyakinkan karena peserta didik cenderung meniru apa yang dilihat dari figur otoritas di sekitarnya daripada apa yang didengar (Zuriah & Yustianti, 2007). Dosen atau guru yang mengajarkan kedisiplinan harus datang tepat waktu, dan yang mengajarkan kejujuran harus objektif dalam penilaian. Ketimpangan antara ucapan dan tindakan pendidik akan menyebabkan kegagalan fatal dalam proses pembiasaan nilai.

Metode pembiasaan nilai juga harus diiringi dengan penguatan (*reinforcement*) baik berupa penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*) yang mendidik. Penghargaan diberikan untuk mengapresiasi perilaku positif agar terus dipertahankan, sedangkan hukuman diberikan untuk mengoreksi perilaku negatif agar tidak diulangi. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam pembiasaan nilai harus dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan agar dapat diterima oleh nalar peserta didik sebagai konsekuensi logis dari tindakannya (Mualif, 2024). Hal ini bertujuan untuk membangun

kesadaran hukum dan tanggung jawab moral individu terhadap pilihan perilakunya. Maka dengan demikian, pembiasaan nilai melatih individu untuk memiliki otonomi moral yang bertanggung jawab.

3. *Civic Virtue* dan *Civic Responsibility*

Civic Virtue atau kebajikan kewarganegaraan adalah watak atau karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk menjamin kelangsungan hidup sistem demokrasi. Konsep ini mencakup disposisi atau kecenderungan batin warga negara untuk menempatkan kepentingan umum (kebaikan bersama) di atas kepentingan pribadi atau kelompok. *Civic virtue* merupakan unsur esensial dalam *civic disposition* yang mencakup *private character* (karakter privat) seperti tanggung jawab moral dan *public character* (karakter publik) seperti kepedulian sebagai warga negara (Septiana, 2020). Tanpa adanya kebajikan kewarganegaraan, sebuah negara demokrasi akan terjebak dalam anarki atau tirani karena warganya tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai bersama. Di Indonesia, kebajikan ini berakar pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah.

Civic Responsibility atau tanggung jawab kewarganegaraan adalah perwujudan aktif dari *civic virtue* dalam bentuk partisipasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum seperti membayar pajak, tetapi juga kewajiban moral dan sosial untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Tanggung jawab warga negara meliputi partisipasi dalam proses politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya (Mulia, 2024). Warga negara yang bertanggung jawab menyadari bahwa hak yang mereka miliki selalu beriringan dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Kesadaran ini penting untuk membangun masyarakat madani (*civil society*) yang mandiri dan berdaya.

Hubungan antara *civic virtue* dan *civic responsibility* sangat erat, di mana kebajikan merupakan fondasi internal, sedangkan tanggung jawab adalah ekspresi eksternalnya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, tujuannya adalah membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) yang memiliki kedua aspek tersebut secara seimbang. Warga negara yang memiliki *civic virtue* akan secara sukarela menjalankan *civic responsibility* tanpa perlu paksaan dari aparat negara, karena didorong oleh kesadaran etis yang tinggi (Somantri, 2001). Hal ini menciptakan stabilitas sosial dan politik yang dinamis karena didukung oleh partisipasi rasional dari warganya. Sebaliknya, lunturnya kedua hal ini akan menyebabkan apatisme politik dan disintegrasi sosial.

Dalam perspektif Pancasila, *civic virtue* dan *civic responsibility* memiliki karakteristik khas yang religius dan humanis. Kebajikan warga negara Indonesia selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semangat persaudaraan sesama anak bangsa. Karakter kewarganegaraan Indonesia tidak bersifat individualistik liberal, melainkan bersifat monodualistik yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam bingkai persatuan. Oleh karena itu, pengembangan kebajikan dan tanggung jawab kewarganegaraan di Indonesia harus selalu merujuk pada sila-sila Pancasila secara utuh. Hal ini merupakan bentuk kewarganegaraan yang multidimensional yang mencakup dimensi personal, sosial, temporal, dan spiritual.

4. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyemaikan nilai-nilai karakter bangsa kepada generasi intelektual muda. Kampus merupakan tempat transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) sekaligus pusat transformasi nilai (*transfer of values*) dan budaya. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepedulian sosial yang tinggi sesuai amanat konstitusi (Andani et al., 2025). Sebagai jenjang pendidikan tertinggi, universitas diharapkan mampu mencetak calon pemimpin bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Kegagalan perguruan tinggi dalam mendidik karakter akan berdampak pada lahirnya kaum intelektual yang korup dan tidak beretika.

Salah satu bentuk nyata peran perguruan tinggi adalah melalui penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan landasan filosofis dan ideologis kepada mahasiswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya di tengah pengembangan kompetensi profesional. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila di perguruan tinggi berfungsi sebagai pendidikan karakter kebangsaan yang membekali mahasiswa dengan seperangkat pengetahuan dan nilai untuk menjadi warga negara yang baik (Widiatmaka, 2021). Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis mengenai masalah kebangsaan dan mencari solusi berdasarkan nilai Pancasila. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Selain jalur kurikuler, perguruan tinggi juga berperan mengembangkan karakter melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi mahasiswa seperti BEM, himpunan mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) berfungsi sebagai laboratorium kepemimpinan

dan pelatihan *soft skills*. Aktivitas kemahasiswaan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempraktikkan nilai toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan demokrasi secara langsung dalam organisasi (Syarbini, 2012). Melalui dinamika organisasi, mahasiswa belajar mengelola konflik, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Pengalaman ini sangat vital sebagai bekal terjun ke masyarakat pasca lulus.

Perguruan tinggi juga harus mengimplementasikan nilai karakter melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat. Melalui program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau proyek sosial lainnya, mahasiswa didorong untuk peka terhadap realitas sosial dan menerapkan ilmunya untuk membantu masyarakat. Pengabdian masyarakat melatih empati dan tanggung jawab sosial mahasiswa (*civic engagement*) serta mendekatkan dunia akademik dengan permasalahan riil di lapangan (Simamora & Dharma, 2024). Dosen pembimbing berperan memfasilitasi proses refleksi nilai selama kegiatan berlangsung agar pengalaman tersebut bermakna. Dengan demikian, perguruan tinggi benar-benar berfungsi sebagai menara air yang memberikan manfaat, bukan menara gading yang terisolasi.

C. Experiential Learning

1. Konsep *Experiential Learning*

Experiential Learning atau pembelajaran berbasis pengalaman adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada peran sentral pengalaman dalam proses belajar manusia. Teori ini dipopulerkan oleh David Kolb yang mendefinisikan belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Belajar bukan sekadar penerimaan konten secara pasif, melainkan proses aktif mengonstruksi pengetahuan dari pengalaman nyata yang dialami peserta didik (Kolb, 2014). Pendekatan ini membedakan dirinya dari model pembelajaran tradisional atau didaktik yang cenderung menempatkan mahasiswa sebagai penerima informasi dari dosen. Dalam konteks *Experiential Learning*, mahasiswa adalah subjek aktif yang terlibat langsung dengan fenomena yang dipelajarinya.

Akar filosofis dari model ini dapat ditelusuri kembali ke pemikiran John Dewey mengenai *learning by doing* atau belajar sambil melakukan. Dewey berpendapat bahwa pendidikan sejati terjadi melalui pengalaman yang menstimulasi dan memberikan tantangan kepada peserta didik untuk berpikir. Pendidikan harus berbasis pada pengalaman kehidupan nyata karena pengalaman memberi makna dan arah bagi proses intelektual seseorang (Dewey, 1986). Hal ini berarti bahwa pemahaman mendalam tidak didapat dari menghafal teori, tetapi dari refleksi atas tindakan yang dilakukan dalam situasi konkret.

Konsep ini sangat relevan untuk mengatasi kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Selain melibatkan aspek kognitif, *Experiential Learning* juga melibatkan aspek afektif dan perilaku secara holistik dalam proses pembelajaran. Model ini menuntut keterlibatan emosi, niat, dan fisik mahasiswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih personal dan bermakna. Pembelajaran eksperiensial melibatkan peserta didik seutuhnya, baik pikiran, perasaan, maupun tindakan, dalam memecahkan masalah nyata (Silberman, 1996). Keterlibatan total ini memungkinkan nilai-nilai (seperti nilai Pancasila) terinternalisasi lebih kuat dibandingkan hanya melalui ceramah. Oleh karena itu, model ini sering digunakan dalam pendidikan karakter dan pengembangan kepribadian.

Penerapan konsep ini dalam pendidikan tinggi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan adaptasi dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia nyata. Mahasiswa didorong untuk keluar dari zona nyaman ruang kelas dan menghadapi dinamika lingkungan sosial yang tidak terduga. Tujuan utama *Experiential Learning* adalah mengembangkan kapasitas pembelajar untuk belajar dari pengalamannya sendiri secara mandiri sepanjang hayat (Moon, 2013a). Dengan demikian, program seperti *academic immersion* bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan sebuah proses konstruksi makna yang terstruktur. Kemampuan merefleksikan pengalaman ini menjadi kunci kompetensi lulusan di era modern.

2. Siklus Pembelajaran

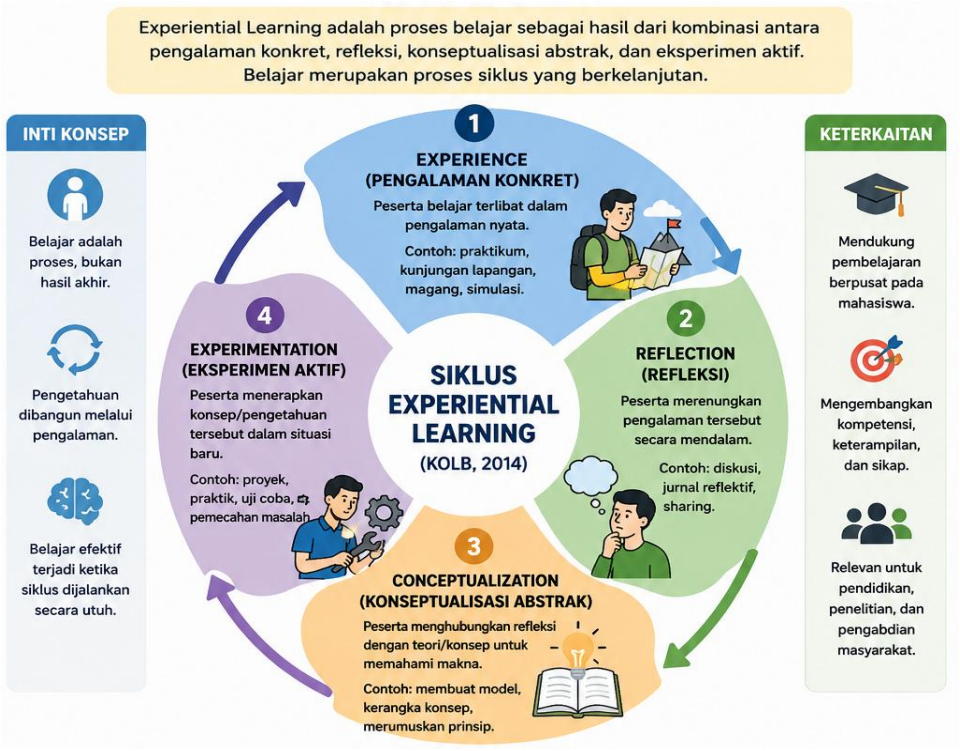
Menurut David Kolb, proses belajar yang efektif melalui pengalaman harus melalui empat tahapan siklus yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah *Concrete Experience* (Pengalaman Konkret), di mana pembelajar melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru tanpa bias. Pada tahap pengalaman konkret, seseorang melakukan atau mengalami sesuatu secara langsung sebagai dasar bagi observasi dan refleksi (Kolb, 2014). Dalam konteks program *immersion*, ini adalah momen ketika mahasiswa turun ke masyarakat dan berinteraksi langsung dengan warga. Tanpa adanya pengalaman langsung ini, pembelajaran hanya akan bersifat abstrak dan simbolik.

Tahap kedua adalah *Reflective Observation* (Observasi Reflektif), di mana pembelajar melakukan observasi dan merenungkan pengalaman yang baru saja dialaminya dari berbagai perspektif. Mahasiswa dituntut untuk melihat kembali apa yang telah terjadi, mencari makna, dan menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan jembatan penting yang mengubah pengalaman mentah menjadi pemahaman yang bermakna bagi pembelajar (Boud et al., 2013). Proses ini membutuhkan ketenangan dan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan

dalam interaksi sosial. Tanpa refleksi, pengalaman hanya akan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak pembelajaran.

Tahap ketiga adalah *Abstract Conceptualization* (Konseptualisasi Abstrak), yaitu proses menyusun teori atau logika dari hasil refleksi sebelumnya. Pada tahap ini, mahasiswa mengintegrasikan observasi mereka ke dalam teori-teori yang logis dan masuk akal. Konseptualisasi abstrak melibatkan pembentukan ide-ide, generalisasi, atau hipotesis baru berdasarkan analisis terhadap pengalaman (Kolb, 2014). Misalnya, mahasiswa merumuskan strategi baru dalam mendekati masyarakat berdasarkan kegagalan atau keberhasilan komunikasi sebelumnya. Tahap ini menunjukkan kemampuan intelektual mahasiswa dalam menghubungkan praktik lapangan dengan teori akademik.

Tahap keempat adalah *Active Experimentation* (Eksperimentasi Aktif), di mana pembelajar menggunakan teori atau konsep yang telah disusun untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan baru. Mahasiswa kembali ke lapangan untuk menerapkan gagasan baru tersebut dalam situasi yang berbeda atau lebih kompleks. Eksperimentasi aktif menutup siklus belajar dengan menguji implikasi konsep dalam situasi baru, yang kemudian akan memunculkan pengalaman konkret baru lagi (Ramsey, 1993). Siklus ini berputar terus-menerus, menciptakan spiral pembelajaran yang semakin mendalam. Melalui siklus ini, kompetensi dan karakter mahasiswa terbentuk secara bertahap dan matang.



Gambar: Siklus Experiental Learning (Kolb, 2014)

3. Implementasi di Masyarakat

Implementasi *Experiential Learning* di masyarakat sering kali diwujudkan dalam bentuk pembelajaran berbasis komunitas (*Community-Based Learning*) atau *Service Learning*. Dalam model ini, masyarakat bukan sekadar objek observasi, melainkan mitra belajar yang aktif dan dinamis. Pembelajaran berbasis masyarakat menempatkan mahasiswa dalam konteks sosial yang otentik untuk mengaplikasikan ilmu sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah warga (Bringle & Hatcher, 1996). Metode ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dua arah antara dunia akademik dan kearifan lokal. Mahasiswa belajar tentang kompleksitas masalah sosial yang tidak tertulis di buku teks, sementara masyarakat terbantu oleh inovasi mahasiswa.

Proses implementasi ini menuntut mahasiswa untuk memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik. Ketika terjun ke lapangan, mahasiswa akan berhadapan dengan keragaman latar belakang, norma, dan nilai yang mungkin berbeda dengan lingkungan kampus. Interaksi langsung dengan masyarakat melatih *soft skills* mahasiswa seperti empati, negosiasi, dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak terstruktur (Furco, 1996). Hal ini sangat relevan dengan latar belakang program *Pancasila Academic Immersion* yang bertujuan mencetak lulusan yang memahami realitas sosial. Keterampilan ini hanya bisa diasah melalui gesekan langsung dengan dinamika kemasyarakatan.

Tantangan dalam implementasi di masyarakat adalah memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap memiliki bobot akademik yang jelas dan terukur. Dosen pembimbing memegang peranan vital untuk mengarahkan kegiatan sosial agar tetap berada dalam koridor tujuan pembelajaran (*learning outcomes*). Keberhasilan implementasi *Experiential Learning* di masyarakat sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan struktur penugasan yang mendorong analisis kritis (Sanjaya, 2006). Kegiatan tidak boleh berhenti pada aktivitas bakti sosial semata, tetapi harus menghasilkan analisis akademik mengenai fenomena yang dihadapi. Struktur ini menjamin integrasi antara pengabdian dan pendidikan.

Dampak dari implementasi ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga membangun citra positif institusi pendidikan di mata publik. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai pelopor pendidikan dapat menunjukkan peran nyatanya dalam pembangunan masyarakat melalui program ini. Keterlibatan mahasiswa di masyarakat memperkuat relevansi kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan zaman dan tantangan pembangunan nasional (Qorib, 2024). Mahasiswa kembali ke kampus dengan wawasan baru yang lebih segar dan kontekstual. Ini menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial.

4. Relevansi untuk Pendidikan Pancasila

Experiential Learning memiliki relevansi yang sangat tinggi dan strategis bagi pendidikan Pancasila, mengingat Pancasila adalah sistem nilai yang harus diamalkan, bukan sekadar dihafal. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan toleransi sulit dipahami secara utuh jika hanya dibahas dalam tataran kognitif di ruang kelas. Pendidikan nilai dan moral membutuhkan pendekatan yang menyentuh dimensi penghayatan dan pengamalan nyata, yang difasilitasi secara optimal oleh metode pembelajaran berbasis pengalaman (Lubis & Harahap, 2025). Melalui *Experiential Learning*, mahasiswa dapat merasakan bagaimana sulitnya bermusyawarah (Sila 4) atau melihat ketimpangan ekonomi secara langsung (Sila 5). Pengalaman emosional ini penting untuk menumbuhkan komitmen moral.

Relevansi metode ini juga terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas sosial yang dihadapi bangsa. Mahasiswa sering kali bersikap apatis karena menganggap Pancasila hanya sebagai dogma yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Metode pengalaman langsung membantu peserta didik mengkontekstualisasikan nilai dasar negara ke dalam pemecahan masalah kontemporer yang mereka temui di lapangan (Yudha, 2025). Ketika mahasiswa mencoba menyelesaikan konflik warga dengan pendekatan kekeluargaan, mereka sedang mempraktikkan esensi Pancasila secara konkret. Hal ini mengubah persepsi Pancasila dari sekadar teks menjadi tindakan".

Selain itu, model ini mendukung pembentukan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang tangguh di tengah era disrupsi informasi. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, mahasiswa belajar memverifikasi informasi dan memahami perspektif yang beragam, sehingga tidak mudah terpapar hoaks atau radikalisme. *Experiential Learning* memperkuat ketahanan ideologi mahasiswa dengan memberikan pengalaman empiris tentang keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia (Zuriah & Yustianti, 2007). Pengalaman hidup bersama masyarakat yang majemuk adalah laboratorium terbaik untuk merawat kebhinekaan. Hal ini sejalan dengan tujuan program *immersion* untuk menjaga jati diri bangsa.

Terakhir, relevansi model ini berkaitan dengan misi UPI untuk mencetak tenaga pendidik dan pemimpin yang berkarakter. Calon pendidik yang pernah mengalami proses belajar langsung di masyarakat akan memiliki metode pengajaran yang lebih inspiratif dan membumi. Guru atau pemimpin yang memiliki pengalaman sosial yang kaya akan lebih mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya melalui keteladanan dan cerita pengalaman (Mulyasa, 2022). *Experiential Learning* dalam pendidikan Pancasila membekali mahasiswa dengan kearifan praktis (*phronesis*) yang tidak diajarkan di buku.

Dengan demikian, Pancasila menjadi hidup dalam setiap tindakan dan keputusan profesional mereka kelak.

D. *Civic Engagement* dan Pemberdayaan

1. Pengertian *Civic Engagement*

Civic engagement atau keterlibatan kewarganegaraan didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk menangani isu-isu yang menjadi kepedulian publik guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut definisi klasik dari Thomas Ehrlich, *civic engagement* berarti bekerja untuk membuat perbedaan dalam kehidupan sipil komunitas kita dan mengembangkan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi untuk membuat perbedaan itu. Keterlibatan ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari sukarelawan individu hingga keterlibatan organisasional dalam pemilu dan advokasi kebijakan publik (Ehrlich, 2000). Konsep ini menekankan bahwa menjadi warga negara tidak cukup hanya dengan status hukum, melainkan harus disertai dengan tindakan aktif yang berkontribusi pada kebaikan bersama (*common good*). Dalam konteks program *immersion*, definisi ini menjadi landasan bahwa mahasiswa harus hadir dan berbuat di tengah masyarakat.

Secara konseptual, *civic engagement* melampaui partisipasi politik formal seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (voting). Konsep ini mencakup dimensi partisipasi sosial yang lebih luas, termasuk interaksi informal antarwarga, gotong royong, dan inisiatif pemecahan masalah komunitas secara mandiri. Keterlibatan kewarganegaraan sangat berkaitan dengan modal sosial (*social capital*), yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan peserta untuk bertindak bersama secara lebih efektif (Putnam, 2000). Tanpa adanya modal sosial yang dibangun melalui keterlibatan ini, masyarakat akan menjadi atomistik dan sulit untuk mencapai tujuan kolektif. Mahasiswa yang terlibat dalam *civic engagement* pada dasarnya sedang menenun kembali ikatan sosial yang mungkin renggang di masyarakat.

Dalam ranah pendidikan tinggi, *civic engagement* sering dikaitkan dengan misi ketiga perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Universitas tidak lagi dipandang sebagai menara gading yang terpisah, melainkan sebagai institusi yang terlibat aktif (*engaged institution*) dalam merespons tantangan zaman. Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi melalui kurikulum yang menghubungkan teori akademik dengan praktik kewarganegaraan (Jacoby & Ehrlich, 2009). Hal ini berarti proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kuliah, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan dinamika publik. Program akademik

yang imersif adalah wujud nyata dari upaya institusi untuk mencetak warga negara yang peduli.

Pentingnya *civic engagement* juga terletak pada pengembangan kompetensi pribadi mahasiswa, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan empati sosial. Melalui keterlibatan langsung, mahasiswa belajar memahami kompleksitas masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan perspektif mereka sendiri. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan *civic engagement* cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi, wawasan multikultural yang lebih baik, dan komitmen jangka panjang terhadap pelayanan publik (Cress et al., 2023). Kompetensi ini sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia akan pemimpin masa depan yang berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, *civic engagement* bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan inti dari pendidikan karakter itu sendiri.

2. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial adalah keterlibatan mental, emosional, dan fisik seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab atas pencapaian tersebut. Partisipasi ini berbeda dengan mobilisasi, di mana partisipasi muncul dari kesadaran internal (*bottom-up*), sedangkan mobilisasi adalah pergerakan yang digerakkan dari luar atau atas (*top-down*). Partisipasi sosial yang otentik mensyaratkan adanya kebebasan dan otonomi individu untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, atau materi demi kepentingan bersama tanpa adanya paksaan (Davis, 1989). Dalam konteks masyarakat Indonesia, bentuk partisipasi ini sangat kental dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas budaya bangsa. Melalui partisipasi, individu merasa menjadi bagian integral dari komunitasnya.

Menurut kerangka kerja yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff, partisipasi sosial dapat dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Tahap pengambilan keputusan melibatkan masyarakat dalam merencanakan apa yang akan dilakukan, sedangkan tahap pelaksanaan adalah wujud nyata kontribusi tenaga atau sumber daya. Partisipasi yang utuh tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai buruh pelaksana proyek, tetapi juga melibatkan mereka sejak tahap identifikasi masalah hingga penilaian keberhasilan program (Cohen & Uphoff, 1977). Program *academic immersion* harus memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya datang membawa program jadi, tetapi mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahapan tersebut.

Partisipasi sosial juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan berpartisipasi, masyarakat belajar untuk mengidentifikasi

potensi diri mereka sendiri dan mengatasi ketergantungan pada bantuan eksternal. Pemberdayaan melalui partisipasi bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengontrol sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari (Suharto, 2009). Ketika mahasiswa berinteraksi dengan warga, tujuannya adalah memfasilitasi tumbuhnya kesadaran kritis dan kemandirian ini. Partisipasi yang efektif akan meninggalkan dampak keberlanjutan meskipun mahasiswa telah selesai masa tugasnya.

Namun, partisipasi sosial di era modern menghadapi tantangan berupa individualisme dan apatisme yang semakin meningkat, terutama di kawasan perkotaan. Perubahan gaya hidup dan kesibukan ekonomi sering kali membuat ikatan sosial melonggar dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan menurun. Tantangan utama dalam membangun partisipasi sosial saat ini adalah menciptakan relevansi kegiatan komunitas dengan kebutuhan praktis warga agar mereka tergerak untuk terlibat (Adi, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan mahasiswa harus inovatif dan menyentuh kebutuhan riil warga agar partisipasi dapat tumbuh kembali. Strategi pendekatan kultural menjadi kunci dalam membangkitkan semangat partisipasi ini.

3. Peran Mahasiswa

Mahasiswa memegang posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, yang sering dideskripsikan dengan tiga peran utama, yakni *agent of change* (agen perubahan), *social control* (kontrol sosial), dan *iron stock* (cadangan masa depan). Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan menjadi dinamisator yang membawa ide-ide pembaharuan dan inovasi ke tengah masyarakat yang mungkin statis. Mahasiswa memiliki privilese intelektual dan akses terhadap pengetahuan yang menuntut mereka untuk mentransformasikan ilmu tersebut menjadi solusi bagi permasalahan rakyat (Faruq & Bakar, 2025). Peran ini menuntut keberanian untuk mendobrak status quo yang tidak adil dan menawarkan alternatif solusi yang konstruktif. Dalam program *immersion*, peran ini diwujudkan melalui transfer pengetahuan teknologi atau metode baru kepada warga desa.

Fungsi kontrol sosial menempatkan mahasiswa sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan penyambung lidah rakyat (*voice of the voiceless*). Mahasiswa memiliki independensi moral yang memungkinkan mereka untuk bersikap objektif dalam menilai ketimpangan sosial yang terjadi di sekitarnya. Peran kontrol sosial mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, tetapi juga melalui advokasi berbasis data dan pendampingan langsung kepada masyarakat yang tertindas (Swasono & Hatta, 2002). Dengan hidup bersama masyarakat, mahasiswa dapat melihat secara langsung efektivitas

kebijakan publik dan kesenjangan yang terjadi. Hal ini melatih kepekaan nurani dan daya kritis mahasiswa terhadap realitas keadilan sosial.

Sebagai *iron stock* atau cadangan kepemimpinan masa depan, mahasiswa adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan karakter dan integritasnya sejak dini. Masa kuliah adalah kawah candradimuka untuk menempa kualitas kepemimpinan, manajemen organisasi, dan etika publik sebelum mereka memegang jabatan strategis. Kualitas kepemimpinan masa depan sangat ditentukan oleh seberapa dalam mahasiswa memahami denyut nadi kehidupan rakyatnya selama masa pembentukan dirinya di perguruan tinggi (Kartono, 1994). Program yang mendekatkan mahasiswa dengan rakyat akan melahirkan pemimpin yang empatik dan tidak elitis. Pemimpin yang lahir dari proses ini akan memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai kearifan lokal.

Selain itu, peran mahasiswa juga terkait erat dengan tanggung jawab intelektual untuk mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian. Ilmu yang didapat di kampus tidak boleh mengendap sebagai teori semata, tetapi harus memiliki nilai guna (*utilitarian value*) bagi kemaslahatan umat manusia. Intelektual muda memiliki kewajiban moral untuk tidak mengasingkan diri dari penderitaan masyarakat, melainkan menggunakan kecerdasannya untuk mengangkat harkat hidup orang banyak (Azra, 2002). Peran ini menegaskan bahwa kesuksesan mahasiswa tidak hanya diukur dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), tetapi dari dampak sosial yang mereka ciptakan. *Academic immersion* adalah wahana untuk menguji kebermanfaatan ilmu tersebut.

4. Proyek Aksi Sosial

Proyek aksi sosial adalah kegiatan terencana dan terstruktur yang dirancang untuk menangani masalah spesifik dalam komunitas melalui mobilisasi sumber daya dan partisipasi aktif. Berbeda dengan kegiatan amal (*charity*) yang bersifat sesaat dan searah, aksi sosial menekankan pada perubahan sistemik dan kemitraan sejajar. Aksi sosial yang efektif harus didasarkan pada analisis kebutuhan (*needs assessment*) yang akurat serta melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek penderita (Parsons et al., 1994). Hal ini berarti sebelum mahasiswa melakukan intervensi, mereka harus melakukan pemetaan sosial untuk memahami akar masalah yang sebenarnya. Proyek yang baik adalah proyek yang menjawab kebutuhan warga, bukan proyek yang diinginkan mahasiswa.

Dalam konteks akademik, proyek aksi sosial sering diintegrasikan dengan model *Service Learning*, di mana layanan kepada masyarakat dikombinasikan dengan tujuan pembelajaran akademik. Melalui proyek ini, mahasiswa menerapkan konsep-konsep disiplin ilmunya (seperti pendidikan, ekonomi,

kesehatan) untuk memecahkan masalah nyata. Integrasi aksi sosial ke dalam kurikulum memberikan pengalaman belajar yang transformatif, di mana mahasiswa menguji validitas teori akademik dalam laboratorium kehidupan nyata (Waterman, 2014). Misalnya, mahasiswa pendidikan membuat program literasi desa, atau mahasiswa ekonomi membantu manajemen UMKM. Proyek semacam ini memberikan manfaat ganda (*reciprocity*), yakni masyarakat terbantu, mahasiswa belajar.

Keberhasilan sebuah proyek aksi sosial sangat ditentukan oleh keberlanjutan (*sustainability*) program tersebut setelah mahasiswa meninggalkan lokasi. Proyek yang hanya bersifat hit and run atau sekadar menggugurkan kewajiban sering kali tidak memberikan dampak jangka panjang. Perencanaan proyek aksi sosial harus mencakup strategi *exit* yang jelas, yaitu bagaimana mentransfer kepemilikan program kepada masyarakat agar dapat terus berjalan secara mandiri (Ife & Tesoriero, 2006). Oleh karena itu, fokus utama proyek bukan pada memberikan bantuan fisik, tetapi pada transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) warga. Kaderisasi lokal menjadi indikator keberhasilan yang penting dalam proyek aksi sosial.

Selain itu, proyek aksi sosial merupakan sarana aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, terutama sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial. Melalui kerja keras di lapangan, mahasiswa belajar arti solidaritas, pengorbanan, dan kerjasama tim dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Aksi sosial menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang mendalam dan mengubah paradigma mahasiswa dari orientasi diri sendiri (*self-centered*) menjadi orientasi pada orang lain (*other-centered*) (Morton, 1995). Pengalaman mengelola proyek sosial ini akan menjadi bekal berharga bagi portofolio mahasiswa di dunia kerja. Ini adalah bukti nyata bahwa pendidikan Pancasila dapat dioperasionalisasikan menjadi tindakan nyata yang berdampak.

E. Imersi Akademik

1. Konsep Imersi

Istilah imersi secara harfiah berarti penenggelaman atau pencelupan, yang dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai metode pembelajaran di mana peserta didik ditempatkan secara total di dalam lingkungan yang dipelajari. Awalnya, konsep ini berkembang dalam pembelajaran bahasa (*language immersion*), di mana pembelajar tinggal di lingkungan penutur asli untuk menguasai bahasa secara alami. Namun, konsep ini telah berkembang menjadi *academic immersion* atau imersi akademik, yaitu strategi pendidikan yang menempatkan mahasiswa secara intensif dalam lingkungan sosial atau budaya tertentu untuk mencapai pemahaman mendalam. Pembelajaran imersi

menciptakan lingkungan belajar yang otentik di mana peserta didik tidak hanya mengamati dari luar, tetapi menjadi bagian integral dari komunitas tempat mereka belajar (Lave & Wenger, 1991). Dalam konteks ini, dinding kelas runtuh dan digantikan oleh realitas kehidupan masyarakat sebagai ruang belajar utama.

Konsep imersi akademik menekankan pada aspek kehadiran penuh (*being there*) yang melibatkan seluruh indra dan emosi mahasiswa dalam proses belajar. Berbeda dengan kunjungan lapangan (*field trip*) yang bersifat singkat dan superfisial, imersi mensyaratkan durasi waktu yang cukup dan interaksi yang intensif dengan penduduk lokal. Imersi budaya melibatkan pergeseran perspektif dari etnosentrisme menuju etnorelativisme, yang hanya bisa dicapai melalui kontak langsung dan berkelanjutan dengan kelompok budaya yang berbeda (Bennett, 1993). Mahasiswa dituntut untuk hidup, makan, dan beraktivitas bersama masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan denyut nadi kehidupan yang sesungguhnya. Proses ini memaksa mahasiswa untuk keluar dari zona nyaman akademik mereka dan beradaptasi dengan norma-norma baru.

Secara teoritis, konsep ini berakar pada teori pembelajaran situasional (*situated learning*) yang berpandangan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks di mana pengetahuan itu digunakan. Pengetahuan yang didapat di ruang kuliah sering kali bersifat abstrak dan dekontekstual, sedangkan pengetahuan di lapangan bersifat konkret dan terikat konteks. Pembelajaran yang efektif terjadi ketika individu terlibat dalam praktik sosial yang nyata di komunitas, yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan secara implisit (Wenger, 1999) Imersi menyediakan konteks yang kaya (*context-rich environment*) yang memungkinkan mahasiswa menghubungkan teori-teori abstrak dengan praktik nyata di lapangan. Hal ini menjadikan pengetahuan yang diperoleh lebih tahan lama dalam memori jangka panjang.

Selain itu, konsep imersi juga mengandung dimensi psikologis yang kuat, yaitu adanya keterlibatan emosional dan tantangan adaptasi yang memicu pertumbuhan pribadi. Ketika berada dalam situasi imersi, mahasiswa sering menghadapi disorientasi atau gegar budaya (*culture shock*) yang memaksa mereka untuk melakukan reorientasi nilai dan perilaku. Pengalaman disorientasi dalam program imersi justru merupakan titik awal dari proses pembelajaran transformatif yang mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan dirinya sendiri (Mezirow, 2000). Tanpa adanya tantangan psikologis ini, pembelajaran cenderung datar dan tidak membekas. Oleh karena itu, imersi akademik dirancang bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk pertumbuhan karakter melalui tantangan nyata.

2. Tujuan Program Imersi

Tujuan utama dari program imersi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi interkultural (*intercultural competence*) mahasiswa agar mampu berinteraksi secara efektif dan patut dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Di era globalisasi, kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya menjadi keterampilan abad ke-21 yang sangat krusial. Kompetensi interkultural mencakup pengetahuan budaya, keterampilan komunikasi, dan sikap keterbukaan yang dikembangkan melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan 'yang liyan' (*the other*) (Deardorff, 2006). Mahasiswa diajarkan untuk menunda penilaian (*suspend judgment*), mendengarkan dengan empati, dan melihat masalah dari perspektif masyarakat lokal. Tujuan ini sangat relevan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Tujuan kedua adalah memfasilitasi pengembangan keterampilan lunak (*soft skills*) yang sulit diajarkan melalui metode ceramah di dalam kelas, seperti kepemimpinan, kemampuan adaptasi, dan pemecahan masalah. Dalam situasi imersi, mahasiswa sering dihadapkan pada masalah-masalah tak terduga yang menuntut mereka untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan secara mandiri. Lingkungan imersi yang tidak terstruktur melatih resiliensi dan kemandirian mahasiswa dalam menghadapi ketidakpastian, yang merupakan kualitas penting bagi seorang pemimpin masa depan (Paige et al., 2009). Mahasiswa belajar untuk mengelola stres, bekerja dalam tim yang beragam, dan bernegosiasi dengan tokoh masyarakat. Keterampilan ini menjadi bekal berharga bagi kesiapan kerja (*employability*) mereka kelak.

Tujuan selanjutnya berkaitan dengan pendalaman pemahaman akademik melalui kontekstualisasi materi perkuliahan dengan realitas di lapangan. Program imersi bertujuan menjembatani kesenjangan (*gap*) antara teori yang ideal dengan praktik yang sering kali penuh dinamika dan kontradiksi. Tujuan akademik dari program lapangan adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguji validitas teori, mengumpulkan data primer, dan menganalisis fenomena sosial secara komprehensif (Engle & Engle, 2003). Misalnya, mahasiswa sosiologi dapat melihat langsung struktur sosial desa, atau mahasiswa pendidikan dapat melihat tantangan mengajar di daerah terpencil. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi hidup dan relevan bagi mahasiswa.

Terakhir, program imersi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan global maupun nasional. Melalui interaksi intensif dengan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung, diharapkan tumbuh rasa empati dan keinginan untuk berkontribusi bagi perubahan sosial. Program imersi didesain untuk mengubah mahasiswa dari sekadar turis akademik menjadi warga negara yang sadar sosial dan

berkomitmen terhadap keadilan sosial (Bringle & Hatcher, 1996). Tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

3. Imersi dan Deep Learning

Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar di mana peserta didik berusaha memahami makna di balik materi, menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan sebelumnya, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi baru. Hal ini berbeda dengan *surface learning* (pembelajaran permukaan) yang hanya berfokus pada menghafal fakta untuk lulus ujian tanpa pemahaman sejati. Pendekatan *deep learning* didorong oleh motivasi intrinsik untuk mengerti dan keterlibatan aktif dalam proses pencarian makna, yang sering kali dipicu oleh masalah-masalah kompleks di dunia nyata (Biggs & Tang, 2003). Program imersi secara alami mendorong mahasiswa masuk ke dalam mode *deep learning* karena mereka harus menggunakan pengetahuannya untuk bertahan dan berfungsi di lingkungan baru. Dalam situasi imersi, hafalan semata tidak akan membantu memecahkan masalah sosial yang dihadapi.

Lingkungan imersi menyediakan kompleksitas yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) seperti analisis, evaluasi, dan kreasi. Mahasiswa tidak disuguhi jawaban yang sudah jadi seperti di buku teks, melainkan harus merumuskan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri dari fenomena yang diamati. Pengalaman langsung yang kaya dan terkadang membingungkan memaksa struktur kognitif pembelajar untuk bekerja lebih keras dalam mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam (Piaget, 1970). Proses kognitif yang intens ini memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi bukan sekadar transfer informasi, melainkan konstruksi pengetahuan yang bermakna. Mahasiswa dipaksa untuk berpikir kritis mengenai *mengapa* suatu fenomena terjadi, bukan hanya *apa* yang terjadi.

Selain aspek kognitif, *deep learning* dalam program imersi juga diperkuat oleh keterlibatan emosional yang kuat (*emotional engagement*). Penelitian neurosains menunjukkan bahwa emosi memainkan peran kunci dalam proses memori dan pembelajaran; informasi yang disertai dengan muatan emosi akan lebih mudah diingat dan dipahami. Pembelajaran yang melibatkan pengalaman emosional, seperti empati terhadap penderitaan orang lain atau kegembiraan saat berhasil membantu, menciptakan jejak memori yang kuat dan mendalam di otak (Immordino-Yang & Damasio, 2007). Ketika mahasiswa berinteraksi dengan warga desa dan merasakan perjuangan hidup mereka, nilai-nilai Pancasila tidak

lagi menjadi konsep abstrak, tetapi menjadi pengalaman batin yang mendalam. Keterlibatan hati inilah yang membedakan imersi dengan kuliah reguler.

Imersi juga memfasilitasi refleksi kritis yang merupakan komponen esensial dari *deep learning*. Tanpa refleksi, pengalaman hanya akan menjadi kejadian yang lewat begitu saja (*event*), namun dengan refleksi, pengalaman berubah menjadi pembelajaran (*learning*). Dalam *deep learning*, pembelajar secara aktif melakukan metakognisi, yaitu memikirkan tentang bagaimana mereka berpikir dan belajar dari pengalaman mereka sendiri (Moon, 2013b). Program imersi biasanya mewajibkan mahasiswa menulis jurnal harian atau melakukan diskusi reflektif untuk memproses pengalaman mereka. Melalui proses ini, mahasiswa menarik benang merah antara teori akademik dan praktik lapangan, yang menghasilkan sintesis pengetahuan yang orisinal dan mendalam.

4. Integrasi Nilai Pancasila

Integrasi nilai Pancasila dalam program imersi akademik dilakukan dengan menjadikan lingkungan masyarakat sebagai laboratorium hidup bagi pengamalan sila-sila Pancasila. Pancasila tidak diajarkan secara doktriner melalui ceramah, melainkan dialami (*experienced*) melalui praktik kehidupan sehari-hari bersama masyarakat. Pembudayaan nilai Pancasila paling efektif dilakukan melalui pendekatan keteladanan dan pembiasaan dalam lingkungan sosial yang nyata, di mana nilai tersebut beroperasi sebagai norma hidup (Sasi et al., 2025). Mahasiswa dapat menyaksikan dan mempraktikkan toleransi beragama (Sila 1) saat berinteraksi dengan warga yang berbeda keyakinan, atau mempraktikkan musyawarah (Sila 4) saat merencanakan kegiatan desa. Imersi mengubah Pancasila dari teks statis menjadi dinamika sosial yang hidup.

Program ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami makna gotong royong sebagai intisari Pancasila secara kontekstual dan mendalam. Dalam kegiatan imersi, mahasiswa sering kali terlibat dalam kerja bakti, perbaikan fasilitas umum, atau kegiatan pertanian bersama warga yang mencerminkan semangat persatuan. Gotong royong bukan sekadar kerjasama fisik, tetapi merupakan manifestasi dari jiwa kebersamaan dan solidaritas sosial yang menjadi identitas budaya bangsa Indonesia (Latif, 2011). Melalui partisipasi langsung, mahasiswa merasakan semangat kekeluargaan yang mungkin sudah mulai luntur di lingkungan perkotaan yang individualis. Pengalaman ini menanamkan memori kolektif tentang pentingnya persatuan (Sila 3) bagi keberlangsungan bangsa.

Integrasi nilai Keadilan Sosial (Sila 5) juga menjadi fokus utama dalam imersi akademik, di mana mahasiswa dihadapkan pada realitas ketimpangan yang ada di masyarakat. Melihat langsung kondisi masyarakat yang kurang beruntung dapat membangkitkan kepekaan nurani dan panggilan moral

mahasiswa untuk berbuat sesuatu. Pendidikan Pancasila harus mampu membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap ketidakadilan struktural dan mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang berpihak pada kaum lemah (Saputra, 2025).

Akhirnya, integrasi nilai Pancasila melalui imersi bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang memiliki integritas nasionalisme yang kokoh di tengah arus globalisasi. Dengan menyelami kehidupan rakyat, mahasiswa akan semakin mencintai tanah airnya dan memahami tantangan riil yang dihadapi bangsanya. Pendidikan karakter bangsa melalui pengalaman langsung di masyarakat akan memperkuat *sense of belonging* dan tanggung jawab sejarah generasi muda terhadap masa depan Indonesia (Althafullayya, 2024). Program *Pancasila Academic Immersion* menjamin bahwa lulusan universitas tidak tercabut dari akar budayanya, melainkan justru semakin kuat memegang teguh jati diri bangsa. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa imersi merupakan jembatan yang menghubungkan intelektualitas kampus dengan kearifan lokal nusantara.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM

A. Status Program

Program *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak merupakan kegiatan ko-kurikuler yang terintegrasi dengan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan (S1/D4) yang mengontrak mata kuliah tersebut. Program ini dirancang sebagai penguatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah melalui aktivitas reflektif, kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen pengampu.

Secara akademik, implikasi dari status program ko-kurikuler ini adalah:

1. Menjadi bagian dari strategi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila;
2. Wajib diikuti oleh mahasiswa pengontrak mata kuliah Pendidikan Pancasila.
3. Kegiatan ko-kurikuler adalah bagian pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), khususnya pada aspek sikap, keterampilan sosial, kepemimpinan, kolaborasi, refleksi nilai kebangsaan, dan penguatan karakter mahasiswa.
4. Menjadi bagian penilaian pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Partisipasi, laporan refleksi, proyek sosial, presentasi, atau portofolio kegiatan dapat dijadikan komponen asesmen dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila.
5. Memperkuat pembelajaran kontekstual dan transformative, Mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi mengalami secara langsung praktik nilai-nilai Pancasila melalui interaksi sosial, pengabdian, observasi lapangan, atau kegiatan komunitas.

B. Sasaran Program

Pelaksanaan program ini diarahkan pada berbagai kegiatan di lingkungan nyata di luar kampus yang memungkinkan mahasiswa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial, pendidikan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa dapat memilih salah satu atau lebih sasaran program yang diinginkan. Dalam berkegiatan, mahasiswa wajib berkelompok sesuai petunjuk dosen pengampu matakuliah. Secara khusus, program ditujukan untuk:

1. Satuan Pendidikan
   Satuan pendidikan menjadi ruang utama implementasi Program *Pancasila Academic Immersion* karena mahasiswa dapat mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, dan interaksi sosial. Melalui observasi, pendampingan guru, penguatan karakter siswa, serta pengembangan proyek sosial dan literasi digital, mahasiswa memperoleh pengalaman kontekstual yang memperkuat kompetensi pedagogik, kepemimpinan, komunikasi, dan empati sebagai calon pendidik profesional.
2. Pemerintah Daerah dan Lembaga Pelayanan Publik
   Pemerintah daerah dan lembaga pelayanan publik menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa untuk memahami implementasi nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Mahasiswa dapat terlibat dalam asistensi layanan publik, edukasi literasi digital, analisis kebijakan, dan penguatan etika birokrasi sehingga mampu mengembangkan integritas, komunikasi publik, serta pemahaman mengenai pelayanan yang humanis, demokratis, dan berkeadilan sosial.
3. Komunitas dan Masyarakat
   Komunitas dan masyarakat menjadi ruang experiential learning bagi mahasiswa untuk memahami dinamika sosial, keberagaman budaya, dan praktik nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, edukasi toleransi, penguatan gotong royong, dan literasi digital mendorong mahasiswa mengembangkan kepedulian sosial, empati, komunikasi lintas budaya, serta kemampuan menjadi agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Lembaga Sosial dan Kemanusiaan
   Lembaga sosial dan kemanusiaan menjadi wahana pembelajaran berbasis kepedulian untuk mengembangkan empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Melalui pendampingan kelompok rentan, edukasi karakter, fasilitasi kegiatan sosial, dan program pemberdayaan, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam mengaktualisasikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai bagian dari implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

5. Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
   Dunia usaha dan industri menjadi laboratorium profesional bagi mahasiswa untuk memahami penerapan nilai Pancasila dalam etika kerja, budaya organisasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mahasiswa dapat terlibat dalam inovasi layanan, kegiatan CSR, dan asistensi operasional sehingga mengembangkan soft skills, integritas, kerja sama tim, kreativitas, serta kesiapan menghadapi dunia kerja berbasis karakter dan profesionalisme.
6. Lembaga Keagamaan dan Kebudayaan
   Lembaga keagamaan dan kebudayaan menjadi ruang pembelajaran untuk menanamkan nilai spiritualitas, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Melalui dialog lintas iman, pelestarian budaya lokal, dan kegiatan berbasis kearifan lokal, mahasiswa mengembangkan sikap moderat, inklusif, dan berkeadaban serta memahami pentingnya harmoni sosial sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

C. Lokasi Kegitan

Pelaksanaan Program *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak dirancang untuk berlangsung di berbagai lokasi di luar kampus UPI yang memungkinkan mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual, nyata, dan berbasis pengalaman lapangan (*experiential learning*). Adapun alternatif lokasi kegiatan program mencakup:

1. Satuan Pendidikan
   Lokasi kegiatan meliputi:
   - SD, SMP, SMA/SMK
   - Sekolah binaan UPI
   - Sekolah negeri maupun swasta
   - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
   - Satuan Pendidikan inklusi

2. Pemerintah Daerah dan Lembaga Pelayanan Publik
   Lokasi kegiatan meliputi:
   - Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota
   - Kecamatan dan kelurahan/desa
   - Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
   - Puskesmas, rumah layanan publik, balai pelatihan
   - Kantor pelayanan administrasi

3. Komunitas dan Masyarakat
   Lokasi kegiatan meliputi:
   - Desa/kelurahan
   - Komunitas pemuda/karang taruna
   - Komunitas seni dan budaya
   - Organisasi kemasyarakatan lokal
   - Ruang publik komunitas (sanggar, rumah kreatif)

4. Lembaga Sosial dan Kemanusiaan
   Lokasi kegiatan meliputi:
   - Panti asuhan
   - Panti sosial lanjut usia
   - Lembaga disabilitas
   - Rumah singgah
   - Lembaga perlindungan perempuan & anak
   - Organisasi kemanusiaan/NGO sosial

5. Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
   Lokasi kegiatan meliputi:
   - Perusahaan nasional maupun lokal
   - Koperasi dan UMKM
   - Industri kreatif
   - Instansi profesional
   - Badan usaha milik negara (BUMN) atau BUMD

6. Lembaga Keagamaan dan Kebudayaan
   Lokasi kegiatan meliputi:
   - Rumah ibadah
   - Majelis taklim, komunitas religius
   - Lembaga adat
   - Sanggar seni dan budaya
   - Museum, galeri, pusat kebudayaan

D. Durasi Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak adalah selama mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila. Kegiatan mahasiswa pada Program *Pancasila Academic Immersion* di lapangan sekurang-kurangnya 32 jam.

E. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak mengikuti alur yang terstruktur agar memastikan program berjalan efektif, terukur, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa. Program dilaksanakan dalam proses perkuliahan Pendidikan Pancasila yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
    a. Orientasi dan Pembekalan
        - Dosen menyampaikan berbagai program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
        - Dosen menyampaikan syarat dalam merencanakan dan melaksanakan program yaitu salah satunya wajib berkelompok (berkolaborasi)
        - Dosen menyampaikan tugas, target, dan etika di lapangan.
    b. Pembagian Kelompok dan Penentuan Kegiatan
        - Kelompok mahasiswa terdiri atas 5 – 7 mahasiswa dan keanggotaannya dapat lintas kelas, lintas program studi, dan lintas fakultas.
        - Kelompok memilih kegiatan dan lokasi program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak
        - Kelompok yang telah terbentuk menyusun rancangan kegiatan *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak yang mencakup jadwal pelaksanaan, pembagian tugas anggota, serta target capaian pada setiap tahapan kegiatan.
    c. Identifikasi masalah
        - Dosen dan mahasiswa berdiskusi mengenai identifikasi masalah dan rancangan kegiatan Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak yang telah dibuat.
        - Dosen dan mahasiswa menyepakati bentuk kegiatan, waktu kegiatan, dan lokasi kegiatan.
    d. Menjalin kemitraan dan komunikasi dengan pihak komunitas sasaran program
        - Melaksanakan koordinasi dan audiensi program dengan komunitas atau mitra sasaran.
        - Melakukan diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat.
        - Membangun komunikasi dan kerja sama berkelanjutan dengan mitra program.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pelaksanaan Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak diatur sebagai berikut:

   a. Waktu pelaksanaan Program *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak disesuaikan dengan rencana kegiatan kelompok dan telah disepakati oleh mitra sasaran program.
   b. Setiap kelompok pada kelas yang sama dapat melaksanakan kegiatan pada waktu dan lokasi yang berbeda sesuai kebutuhan program.
   c. Mahasiswa ditempatkan pada lokasi kegiatan sesuai penugasan dan hasil koordinasi dengan mitra program.
   d. Mahasiswa melakukan pengenalan lingkungan dan orientasi di lokasi kegiatan sebagai bagian dari proses adaptasi program.
   e. Mahasiswa mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi yang terdapat di lokasi kegiatan sebagai dasar pelaksanaan program.
   f. Mahasiswa melaksanakan Program *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak sesuai rencana kegiatan yang telah memperoleh pembimbingan dan persetujuan dosen pengampu.

3. Tahap Pendampingan dan Monitoring

   Kegiatan pendampingan dan monitoring kepada mahasiswa selama di lapangan dapat dilakukan secara daring oleh dosen.

   a. Pendampingan Dosen Pembimbing
      - Dosen berperan melakukan pengarahan, konsultasi, dan penilaian.
      - Monitoring dilakukan secara luring maupun daring.
      - Dosen melakukan penilaian pada pencapaian kompetensi dasar, kedisiplinan, dan implementasi nilai Pancasila. Tahap ini memastikan kegiatan berjalan efektif, relevan, dan sesuai etika
   b. Monitoring oleh Lembaga Mitra
      - Pihak sekolah, pemda, komunitas, atau lembaga sosial memantau aktivitas mahasiswa.
      - Memberikan umpan balik langsung terkait etika, kinerja, dan kontribusi.

4. Tahap Evaluasi, Refleksi, dan Pelaporan
   a. Penyusunan laporan akhir mahasiswa berupa makalah, video kegiatan, portofolio, poster, atau bentuk dokumentasi lainnya.
   b. Pelaksanaan refleksi dan evaluasi kegiatan immersion.
   c. Identifikasi praktik baik (*best practices*) untuk pengembangan program tahun berikutnya.

d. Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut program.
e. Penguatan kerja sama dan komunikasi berkelanjutan dengan lembaga atau komunitas mitra.

F. Ragam Bentuk Kegiatan

Program *Pancasila Academic Immersion* dirancang untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan sosial dan profesional mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter *ilmiah*, *edukatif*, dan *religius* sebagai bagian dari profil lulusan UPI yang berkeadaban, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ketiga karakter tersebut diperkuat melalui kegiatan yang terintegrasi dalam seluruh rangkaian immersion. Adapun alternatif program dan kegiatan yang dapat dipilih yaitu:

1. Program Penguatan Karakter Ilmiah
   Karakter *ilmiah* mencakup kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, dan berbasis data. Program dan kegiatan diarahkan untuk melatih mahasiswa berpikir objektif serta mampu merumuskan solusi ilmiah berbasis nilai Pancasila. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu:
   a. Satu Hari Tanpa Sampah Plastik
   b. Misi Ilmiah: Mengatasi Persoalan di Sekolah
   c. Festival Multikultural
   d. Kampanye Etika Digital Pancasila
   e. Gerakan Kursus Literasi Pancasila, dan lain-lain

2. Program Penguatan Karakter Edukatif
   Karakter *edukatif* menekankan kemampuan mahasiswa sebagai calon pendidik/pembimbing masyarakat yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada pemberdayaan. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu:
   a. Workshop Media Pembelajaran
   b. Workshop Tertib Administrasi
   c. Membangun Kultur Anti Kekerasan Seksual dan Bullying.
   d. Edukasi Pendidikan Anti Korupsi.
   e. Toleransi, Saling Menghormati, Anti Diskriminasi
   f. Anti-Radikalisme
   g. Nasionalisme & Cinta Tanah Air
   h. Pendidikan Berbasis SDGs
   i. Pemilihan Duta Pancasila
   j. Gerakan UMKM Halal
   k. Gerakan Penguatan Karakter Pancasila, dan lain-lain

3. Program Penguatan Karakter Religius
   Karakter *religius* mencakup penguatan nilai spiritualitas, moralitas, etika sosial, dan pemahaman keberagaman sebagai wujud Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu:
   a. Pembinaan kepada remaja masjid
   b. Kegiatan Keputrian
   c. Relawan Kegiatan Sosial dan Keagamaan
   d. Bimbingan Praktis Mengkafani Jenazah
   e. Festival Budaya Religius, dan lain-lain

BAB IV
LAPORAN KEGIATAN DAN KRITERIA PENILAIAN

A. Bentuk Laporan

Bentuk pelaporan mahasiswa dalam Program *Pancasila Academic Immersion* UPI Berdampak antara lain:

1) Laporan Akhir Mahasiswa

   Mahasiswa sebagai peserta wajib membuat laporan secara berkelompok yaitu:

   a. Laporan kegiatan berupa makalah yang memuat sistematika:
      - Sampul dan identitas kelompok
      - Kata pengantar
      - Abstrak
      - Bab I: Pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan, Urgensi Program, dan Manfaat Program)
      - Bab II: Kajian Teori
      - Bab III: Metode Pelaksanaan
      - Bab IV: Hasil Kegiatan (Profil Lokasi, Tahapan Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Kendala dan Tantangan.
      - Bab V: Simpulan dan Saran
      - Dokumentasi
      - Daftar Pustaka
      - Lampiran
   b. Pembuatan video kreatif atau dokumenter yang dipublikasikan melalui platform digital seperti Youtube dan Instagram.

      Format video Youtube:
      - Video berdurasi 5 sd 10 menit.
      - Video Landscape rasio 16:9, minimal resolusi 720p, dengan ekstensi file .mp4
      - Suara harus jelas dan menggunakan suara latar musik yang tidak berlisensi (no copyright).
      - Menggunakan logo UPI di kanan atas video
      - Mencantumkan judul video sesuai nama program kelompok
      - Mencantumkan nama lengkap anggota beserta NIM, prodi, nama dosen pembimbing, dan deskripsi singkat mengenai program kelompok Pancasila Academic Immersion, pada kotak deskripsi di Youtube.

Format Video Instagram

- Video diunggah pada akun Instagram kelompok dan format video menyesuaikan dengan format reels Instagram.
- Menyertakan caption: Nama anggota kelompok dan NIM, nama dosen pembimbing, deskripsi singkat program kegiatan, serta pencantuman caption: #PancasilaAcademicImmersion #UPIberdampak #UPImelesat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian dilaksanakan melalui tiga bentuk evaluasi yang saling melengkapi untuk menilai ketercapaian pembelajaran, kualitas produk kegiatan, serta penguatan karakter mahasiswa.

1. Evaluasi proses dilakukan untuk menilai keterlibatan aktif mahasiswa, kedisiplinan, kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, serta sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila selama pelaksanaan kegiatan immersion. Evaluasi ini berfokus pada ranah afektif dan perilaku mahasiswa dalam konteks nyata di lapangan.
2. Evaluasi produk diarahkan untuk menilai kualitas hasil karya mahasiswa, seperti laporan akhir, video kegiatan, poster, portofolio, atau media kreatif lainnya. Penilaian mencakup kemampuan analitis, kualitas penyajian data, kreativitas, serta keterampilan akademik dan teknis mahasiswa dalam mengolah hasil kegiatan.
3. Evaluasi refleksi dilakukan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam merefleksikan pengalaman belajar, memahami nilai-nilai Pancasila, serta mengaitkan pengalaman immersion dengan pengembangan karakter, identitas kebangsaan, dan tanggung jawab sosial.

Melalui ketiga bentuk evaluasi tersebut, program tidak hanya menilai capaian akademik, tetapi juga menekankan penguatan karakter, kepedulian sosial, dan pembentukan identitas kebangsaan mahasiswa.

Adapun komponen dan indicator penilaian adalah sebagai berikut.

Tabel Indikator Penilaian

Komponen	**Indikator**
Sikap dan keterampilan	- Tanggung jawab dalam menjalankan tugas. - Kemampuan bekerja sama dan toleransi. - Etika berkomunikasi dengan masyarakat. - Kemampuan berfikir kritis - Kreativitas

	- Reflektif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pengalaman nyata.
Pengetahuan	- Pemahaman akan teori nilai Pancasila - Berargumentasi berdasarkan data dan fakta di lapangan
Produk Akhir	- Kualitas artikel (kedalaman analisis, struktur, orisinalitas). - Kualitas video (alur, visual, pesan nilai Pancasila). - Kelengkapan laporan kegiatan. - Presentasi hasil dalam seminar/pameran.

C. Instrumen Evaluasi

1. Rubrik Penilaian Laporan Akhir Mahasiswa:

Komponen	Indikator	Skala	Deskripsi Skala
Sistematika penulisan	Kejelasan struktur, alur logis, dan organisasi laporan.	1-4	1 = Tidak runtut, 4 = Sangat runtut
Relevansi Masalah dan Program yang Dijalankan	Hubungan identifikasi masalah dan program yang dijalankan.	1-4	1 = Tidak Relevan, 4 = Sangat Relevan
Keterlaksanaan Program	Program dijalankan sesuai tahapan.	1-4	1 = Tidak Terlaksana, 4 = Terlaksana
Internalisasi Nilai Pancasila	Terjadinya peningkatan internalisasi nilai.	1-4	1 = Tidak Terinternalisasi, 4 = Sangat Terinternalisasi
Dokumentasi	Kelengkapan foto-foto kegiatan dan data.	1-4	1= Dokumentasi minim, 4 = Dokumentasi Lengkap

Keterangan: Nilai Total adalah Jumlah Skala x 5

2. Rubrik Penilaian Video

Tema Project :
Nama Kelompok :
Anggota Kelompok : ……; ……..; ……..

Komponen	Indikator	Skala (1-4)	Deskripsi Skala
Kesesuaian konten	Keterkaitan video dengan nilai Pancasila dan konteks immersion	1-4	1=Tidak sesuai; 2=Cukup; 3=Baik; 4=Sangat baik

Alur dan Struktur	Kejelasan narasi, transisi, koherensi alur	1-4	1=Tidak runtut; 4=Alur sangat runtut dan kuat
Kreativitas Visual	Visualisasi, estetika, dan daya Tarik	1-4	1=Minim kreativitas; 4=Sangat kreatif & menarik
Kualitas Teknis	Audio, lighting, stabilitas, editing	1-4	1=Banyak gangguan; 4=Teknis sangat baik
Pesan Nilai Pancasila	Kekuatan pesan moral dan nilai luhur	1-4	1=Kurang jelas; 4=Sangat kuat & menyentuh
Jumlah			

Keterangan: Nilai Total: Jumlah Skala x 5

3. Rubrik Penilaian Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan

Nama Mahasiswa :
NIM :
Kelompok :

Komponen	Indikator	Skala (1-4)	Deskripsi Skala
Kolaborasi	Berinisiatif bekerjasama dengan anggota kelompok	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Komunikasi	Kemampuan mengemukakan pendapat	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Berfikir kritis	Kemampuan mengidentifikasi dan menghubungkan antar konsep.	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Kreativitas	Membuat produk yang menarik	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Tanggung jawab	Melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Refleksi nilai Pancasila	Mengamalkan nilai Pancasila	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Pemahaman teoritis	Menggunakan teori yang relevan	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Argumentasi berdasarkan data dan fakta	Berpendapat dengan runtut sesuai fakta dan data	1-4	1= Tidak baik, 4= Sangat Baik
Jumlah			

Keterangan: Nilai akhir = Jumlah skala x 10

D. Bobot dan Skala Penilaian

Penilaian dalam project Pancasila Academic Immersion mencakup:

Komponen	Bobot Penilaian
Partisipasi dan Sikap	20%
Program Kegiatan	25%
Artikel Ilmiah	25%
Video	15%
Laporan Akhir	15%

Kategori Nilai:

- A = 92-100
- A- = 86-91
- B+ = 81-85
- B = 76-80
- B- = 71-75
- C = 66-70
- C = 60-65
- D = 55-59
- E = < 55

E. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:

a. Mengikuti minimal 90% rangkaian kegiatan.
b. Menyelesaikan artikel**,** video**,** dan laporan akhir**.**
c. Mengikuti seminar hasil kegiatan**.**
d. Memperoleh nilai akhir minimal C.
e. Menunjukkan sikap Pancasilais selama kegiatan (tidak ada pelanggaran etika).

F. Diseminasi Hasil Kegiatan

Diseminasi berupa kegiatan seminar yang dapat dilakukan di dalam kelas atau dalam kegiatan yang difasilitasi oleh program studi atau fakultas. Pada seminar hasil kegiatan, kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil program Pancasila Academic Immersion yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar hasil dapat diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari prodi lain.

Dalam kegiatan seminar hasil dapat dilakukan pameran hasil kegiatan oleh kelompok mahasiswa *Pancasila Academic Immersion*, dengan menampilkan dokumentasi kegiatan dalam bentuk poster, foto, infografik, atau video.

G. Tindak Lanjut

Hasil kegiatan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi:

a. Pemerintah desa/kelurahan.
b. Dinas pendidikan/kebudayaan.
c. Lembaga masyarakat terkait isu sosial dan pembangunan lokal.

Rekomendasi berupa:

a. Penguatan program pemberdayaan masyarakat.
b. Dukungan pendidikan karakter berbasis Pancasila.
c. Advokasi masalah sosial yang ditemukan.

Lokasi immersion yang berhasil dapat ditingkatkan menjadi:

a. Lokasi PKM**,**
b. Wilayah binaan kampus untuk keberlanjutan program

BAB V

PENUTUP

Program *Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak* diharapkan menjadi wahana pembelajaran transformatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman nyata di masyarakat. Program ini tidak hanya memperkuat kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan karakter, kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan tanggung jawab kebangsaan. Melalui kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat, program ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan budaya akademik, pembangunan masyarakat, serta pembentukan lulusan UPI yang unggul, berkarakter, dan berdampak bagi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2019). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Althafullayya, M. R. (2024). Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik. *Journal Education Innovation (JEI)*, *2*(1), 163–174.

Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, *8*(01), 760–768.

Andani, D., Kusumawardani, H., Sari, S. M., & Alawiyah, R. (2025). PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, *2*(3), 879–885.

Azra, A. (2002). Paradigma baru pendidikan nasional: Rekonstruksi dan demokratisasi. *(No Title)*.

Bennett, M. J. (1993). Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. *Education for the Intercultural Experience*, *2*, 21–71.

Biggs, J., & Tang, C. (2003). Teaching for quality learning. *Buckingham: Society For*.

Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (2013). *Reflection: Turning experience into learning*. Routledge.

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. *The Journal of Higher Education*, *67*(2), 221–239.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: concepts and measures for project design, implementation and evaluation.*

Cress, C. M., Collier, P. J., & Reitenauer, V. L. (2023). *Learning through serving: A student guidebook for service-learning and civic engagement across academic disciplines and cultural communities*. Taylor & Francis.

Darmodiharjo, D. (1991). Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis. *Historis, Dan Yuridis Konstitusional*.

Davis, K. (1989). Human behavior at work: Organizational behavior. *(No Title)*.

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, *10*(3), 241–266.

Dewey, J. (1986). Experience and education. *The Educational Forum*, *50*(3), 241–252.

Ehrlich, T. (2000). *Civic responsibility and higher education*. Bloomsbury Publishing PLC.

Engle, L., & Engle, J. (2003). Study abroad levels: Toward a classification of program types. *Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad*, *9*(1), 1–20.

Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Osf. Io, No*, 1–20.

Faruq, U., & Bakar, M. Y. A. (2025). Pendidikan sebagai alat transformasi sosial perspektif filsafat ilmu. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *4*(1), 56–74.

Furco, A. (1996). *Service-learning: A balanced approach to experiential education*.

Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.

Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. *Mind, Brain, and Education*, *1*(1), 3–10.

Jacoby, B., & Ehrlich, T. (2009). *Civic engagement in higher education: Concepts and practices*. Published January 27, 2009 by Jossey-Bass.

Jamiah, K., Hermanto, E., Febriansyah, R., & Perdana, W. (2025). Keadilan sosial dalam perspektif Alquran dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, *9*(1), 68–89.

Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Kartono, K. (1994). *Pemimpin dan kepemimpinan: apakah pemimpin abnormal itu?*

Koesoema, D. (2019). *Pendidikan karakter; Strategi mendidik anakdi zaman global*.

Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. In *Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives*. Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511815355

Lickona, T. (1992). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.

Lubis, M., & Harahap, S. (2025). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dan Kearifan Lokal*. Edu Publisher.

Mahfud, M. D. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu [Constitution and law in controversial issues]. *Jakarta: Raja Grafindo Persada (in Indonesian)*.

Mezirow, J. (2000). *Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series.* ERIC.

Moon, J. A. (2013a). *A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice*. Routledge.

Moon, J. A. (2013b). *Reflection in learning and professional development: Theory and practice*. Routledge.

Morton, K. (1995). *The irony of service: Charity, project and social change in service-learning*. Ann Arbor, MI: Michigan Publishing, University of Michigan Library.

Mualif, R. F. (2024). *Penerapan Reward dan Punishment dalam Membentuk Perilaku Disiplin Belajar Siswa Kelas II MIN 6 Ponorogo*. IAIN Ponorogo.

Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(6), 515–532.

Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.

Notonagoro, S. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tudjuh.

Paige, R. M., Fry, G. W., Stallman, E. M., Josić, J., & Jon, J. (2009). Study abroad for global engagement: The long-term impact of mobility experiences. *Intercultural Education*, *20*(sup1), S29–S44.

Parsons, R. J., Jorgensen, J. D., & Hernandez, S. H. (1994). The integration of social work practice. *(No Title)*.

Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child. Trans. D. Coltman.*

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. *Simon Schuster*.

Qorib, F. (2024). Tantangan dan peluang kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam program pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment*, *2*(2), 46–57.

Ramsey, S. (1993). The active learner and a cycle of involvement: Moving from experience to experimentation. *The Journalism Educator*, *48*(2), 74–80.

Robuwan, R., & Zulkifli, M. A. (2024). Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Fakta Hukum*, *3*(1), 28–34.

Samani, D. R. M. (2019). *Konsep dan model pendidikan karakter*.

Saputra, E. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi: Membangun Karakter Bangsa serta Tantangan Kontemporer*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Sasi, F. X., Bujang, M. R., Seran, P., Nur, S. R. M., & Zega, Y. K. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan*, *2*(2), 153–166.

Septiana, T. (2020). Pembinaan civic disposition berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kerwarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*,

18(1).

Setijo, P. (2009). Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. *Jakarta: Grasindo*.

Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(1), 222–231.

Silberman, M. (1996). *Active learning: 101 strategi pembelajaran aktif*.

Simamora, F., & Dharma, S. (2024). Implementasi Program Kampus Mengajar Terhadap Penguatan Civic Engagement Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa FIS Unimed Peserta Kampus Mengajar). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, *1*(2), 217–229.

Somantri, M. N. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS. *Bandung: Remaja Rosdakarya*, *71*.

Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional di era global. *Law and Justice*, *4*(1), 46–55.

Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.

Swasono, S.-E., & Hatta, M. (2002). Bung Hatta: bapak kedaulatan rakyat. *(No Title)*.

Syarbini, A. (2012). Buku pintar pendidikan karakter. *Jakarta: Prima Pustaka*.

Topayung, S. L., & AP, M. (2025). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PPKn*. PENERBIT KBM INDONESIA.

Waterman, A. S. (2014). *Service-learning: Applications from the research*. Routledge.

Wenger, E. (1999). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge university press.

Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*.

Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak pembangunan karakter Pancasila di perguruan tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *1*(2), 176–185.

Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.

Yudha, A. S. (2025). Komparasi Contextual Learning dan Experiental Learning dalam Proses Pembelajaran. *Journal of Education and Social Culture (JESC)*, *1*(1), 28–33.

Zubaedi, M. A. (2015). *Desain Pendidikan Karakter*. Prenada Media.

Zuriah, N., & Yustianti, F. (2007). *Pendidikan moral & budi pekerti dalam perspektif perubahan: menggagas platform pendidikan budi pekerti secara kontekstual dan futuristik*. Bumi Aksara.


The
Education
University